

Lampiran 3



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 1

TAHUN : 2011

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

Lampiran 4

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2013-2016**

KODE REK.	URAIAN	TARGET 2013	REALISASI 2013	LEBIH/KURANG	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	LEBIH/KURANG	%
f	2	31	32	33 = (32-31)	34	35	36	37 = (36-35)	38
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.430.504.348,93	95.991.512.851,06	17.561.008.502,13	22,39	131.892.992.136,75	158.818.431.853,19	26.925.439.716,44	20,41
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	7.633.177.800,00	8.701.734.661,88	1.068.556.861,88	14,00	20.447.388.961,66	21.174.628.265,00	727.239.303,34	3,56
01	Pajak Hotel	80.748.000,00	84.837.425,00	4.089.425,00	5,06	82.250.000,00	76.604.150,00	(5.645.850,00)	(6,86)
09	Hotel Melati dua	22.576.000,00	12.284.500,00	(10.291.500,00)	(45,59)	16.000.000,00	12.976.000,00	(3.024.000,00)	(18,90)
12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	58.172.000,00	72.552.925,00	14.380.925,00	24,72	66.250.000,00	63.628.150,00	(2.621.850,00)	(3,96)
02	Pajak Restoran	373.501.600,00	626.388.004,00	252.886.404,00	67,71	505.445.500,00	795.137.559,00	289.692.059,00	57,31
02	Rumah Makan	150.750.900,00	312.818.928,00	162.068.028,00	107,51	299.750.500,00	454.232.155,00	154.481.655,00	51,54
05	Katering	222.750.700,00	313.569.076,00	90.818.376,00	40,77	205.695.000,00	340.905.404,00	135.210.404,00	65,73
03	Pajak Hiburan	7.725.000,00	6.647.500,00	(1.077.500,00)	(13,95)	7.725.000,00	6.796.000,00	(929.000,00)	(12,03)
02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)	(100,00)	1.448.300,00	570.000,00	(878.300,00)	(60,64)
05	Pameran	1.825.000,00	5.005.000,00	3.180.000,00	174,25	4.552.400,00	6.226.000,00	1.673.600,00	36,76
07	Karaoke	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Balap Kendaraan Bermotor	1.850.000,00	1.642.500,00	(207.500,00)	(11,22)	1.724.300,00	-	(1.724.300,00)	(100,00)
04	Pajak Reklame	515.475.750,00	535.226.578,13	19.750.828,13	3,83	540.144.993,16	542.747.676,00	2.602.682,84	0,48
01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	480.125.000,00	496.187.132,75	16.062.132,75	3,35	515.235.693,16	521.445.202,00	6.209.508,84	1,21
02	Reklame Kain	34.600.750,00	37.132.945,38	2.532.195,38	7,32	22.241.050,00	17.696.474,00	(4.544.576,00)	(20,43)
03	Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	1.906.500,00	1.156.500,00	154,20	2.668.250,00	3.606.000,00	937.750,00	35,34
05	Pajak Penerangan Jalan	4.563.900.300,00	4.929.430.583,00	365.530.283,00	8,01	5.496.000.000,00	5.786.846.889,00	290.846.889,00	5,29
01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.563.900.300,00	4.929.430.583,00	365.530.283,00	8,01	5.496.000.000,00	5.786.846.889,00	290.846.889,00	5,29
06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Batu kapur	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Batu belah/Andesit	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Split/Andesit	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasir pasang bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pasir urug	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pasir batu bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pasir batu urug	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tanah urug/permukaan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bentonit/Abu bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Pajak Parkir	14.300.500,00	14.846.760,00	546.260,00	3,82	14.400.250,00	15.181.100,00	780.850,00	5,42
01	Pajak Parkir	14.300.500,00	14.846.760,00	546.260,00	3,82	14.400.250,00	15.181.100,00	780.850,00	5,42
08	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.625.102,00	625.102,00	15,63	8.215.000,00	10.244.364,00	2.029.364,00	24,70
01	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.625.102,00	625.102,00	15,63	8.215.000,00	10.244.364,00	2.029.364,00	24,70
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	378.026.650,00	376.589.500,00	(1.437.150,00)	(0,38)	400.162.800,00	687.777.220,00	287.614.420,00	71,87
04	Batu kapur	10.500.000,00	2.000.000,00	(8.500.000,00)	(80,95)	5.230.000,00	1.300.000,00	(3.930.000,00)	(75,14)
07	Batu belah/Andesit	90.500.000,00	113.513.500,00	23.013.500,00	25,43	162.675.200,00	423.531.720,00	260.856.520,00	160,35
10	Pasir pasang bangunan	238.451.650,00	249.952.000,00	11.500.350,00	4,82	213.600.600,00	227.370.000,00	13.769.400,00	6,45

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2017

KODE REK.	URAIAN	TARGET 2017 Perub.	REALISASI 2017	%
1	2			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	242.829.753.091,61	249.675.782.208,65	102,82
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	43.024.098.351,29	47.232.364.751,60	109,78
01	Pajak Hotel	49.616.875,00	70.982.760,00	143,06
12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	49.616.875,00	70.982.760,00	143,06
02	Pajak Restoran	1.397.083.643,04	1.632.098.323,60	116,82
02	Rumah Makan	802.530.208,78	974.488.926,30	121,43
05	Katering	594.553.434,26	657.609.397,30	110,61
03	Pajak Hiburan	12.673.050,00	15.752.000,00	124,30
02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.135.750,00	15.448.000,00	189,88
05	Pameran	4.537.300,00	304.000,00	6,70
04	Pajak Reklame	428.160.323,85	444.474.409,00	103,81
01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	405.901.987,50	408.254.124,00	100,58
02	Reklame Kain	22.258.936,35	36.220.285,00	162,72
05	Pajak Penerangan Jalan	8.613.981.982,00	8.936.927.994,00	103,75
01	Pajak Penerangan Jalan	8.613.981.982,00	8.936.927.994,00	103,75
06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.395.354.191,40	4.170.938.730,00	122,84
04	Batu kapur	-	-	-
17	Batu belah/Andesit	1.800.869.920,00	1.944.932.810,00	108,00
28	Pasir pasang bangunan	1.389.075.200,00	2.008.643.920,00	148,72
33	Tanah uruk/permukaan	225.409.071,40	217.362.000,00	96,43
07	Pajak Parkir	44.842.000,00	50.043.000,00	111,60
01	Pajak Parkir	44.842.000,00	50.043.000,00	111,60
08	Pajak Air Tanah	38.675.835,00	57.575.846,00	148,87
01	Pajak Air Tanah	38.675.835,00	57.575.846,00	148,87
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.109.282.845,00	15.329.005.593,00	101,45
03	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.109.282.845,00	15.329.005.593,00	101,45
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.934.427.606,00	16.524.566.096,00	118,59
03	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.934.427.606,00	16.524.566.096,00	118,59
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	7.407.197.578,13	7.329.130.686,19	98,95
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	2.610.457.906,00	2.726.826.250,00	104,46
01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.812.500,00	86.326.550,00	106,82
	- UPTD Laboratorium Kesehatan	80.812.500,00	86.326.550,00	106,82
02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	390.877.156,00	452.816.500,00	115,85
1.	Dinas Perdagangan	294.077.156,00	348.959.400,00	118,66
2.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	92.400.000,00	99.100.000,00	107,25
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	4.400.000,00	4.757.100,00	108,12
05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	333.432.000,00	334.000.500,00	100,17
	- Parkir Kendaraan Bermotor	333.432.000,00	334.000.500,00	100,17